

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 terkait dengan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan upaya Dinas Pendidikan Kota Malang di dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan.

#### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Pendidikan Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

##### a. Kota Malang

Kota Malang merupakan daerah kawasan pendidikan dan banyak masyarakat dari kota lain yang datang ke kota Malang untuk sekolah sehingga berdampak pada

penyebaran guru dan siswa di kota Malang, berdasarkan kepentingannya untuk sekolah atau kuliah ini maka lingkup pendidikan perlu di tingkatkan apalagi dilihat dari segi pengajar.

#### b. Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang

Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden.

##### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan seperti buku, kamus dan perundang-undangan, terkait dengan data mengenai Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pendidikan.

Sumber data :

##### a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, berupa :

1. Data tentang peran Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Serta melakukan wawancara dengan Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Malang.
2. Wawancara dengan Dinas beberapa sekolah yang ada di Kota Malang yang mewakili SD Unggulan, SD Non unggulan, SMP Unggulan, SMP Non unggulan, SMA Unggulan, SMA Non Unggulan.

b) Data Sekunder

Dari buku literatur, koleksi Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah:

a) Data primer diperoleh dengan cara:

1) Wawancara

Merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Responden adalah

Ka. Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Malang serta pihak - pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti yakni untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

## 2) Observasi Lapangan

Dengan melakukan penelitian secara langsung pada guru-guru baik ditingkat SD, SMP maupun SMA yang terkait dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

## b) Data sekunder diperoleh dengan cara:

### 1) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

### 2) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas Pendidikan Kota Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu unit yang akan diteliti.

Populasi penelitian ini adalah Guru di Kota Malang serta pegawai diknas terkait dengan pelaksanaan pasal tersebut.

Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang akan diteliti. Sampel judul ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang.
- b. Ka.Bidang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Malang
- c. Guru di Kota Malang yang antara lain Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 1, SD Negeri Kauman 3, Humas SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 9 dan Koordinator Guru MGMPS yang juga Pengajar di SMP 18 Malang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka.

#### **H. Definisi Operasional**

##### **1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan dan melaksanakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang terkait sistem penyelenggaraan pendidikan.

## 2. Pengertian Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## 3. Pengertian Pengendalian Mutu Pendidikan / Baku Mutu Pendidikan

Pencapaian unsur-unsur baku mutu pendidikan melalui pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu pendidikan yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin.

## 4. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dsb.